

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu dan semakin majunya zaman, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pun akan terus berkembang demi mempermudah jalannya kehidupan manusia. Tentunya banyak aspek yang terpengaruh menjadi lebih positif dari semakin majunya TIK, salah satunya adalah aspek pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas dapat diartikan sebagai segala macam keperluan yang dilakukan oleh negara baik untuk memenuhi kesejahteraan rakyat maupun kepentingan negara. Perkembangan TIK ini memberikan kesempatan pemerintah dalam melakukan pembaruan pembangunan serta perbaikan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government* yang telah diusulkan tidak hanya sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan evaluasi warga terhadap pemerintah secara umum (Tolbert & Mossberger, 2006). *E-Government* yaitu pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan layanan untuk berbagai pihak, seperti masyarakat, aparatur sipil negara, instansi pemerintah, pelaku bisnis, dan berbagai pihak lainnya.

Berdasarkan peringkat *E-Government Development Index* (EGDI) terbaru yaitu tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-88 dari 193 negara di dunia dan menjadi peringkat terendah kelima di kawasan Asia Tenggara (United Nations, 2020). Penjelasan lebih lanjut dijelaskan pada Tabel I.1 Peringkat EGDI Tahun 2020.

Tabel I-1 Peringkat EGDI Tahun 2020

No.	Negara	Peringkat 2020	EGDI 2020
1.	Singapore	11	0.9150
2.	Malaysia	47	0.7892
3.	Thailand	57	0.7565
4.	Brunei Darussalam	60	0.7389
5.	Philippines	77	0.6892

6.	Vietnam	86	0.6667
7.	Indonesia	88	0.6612
8.	Kamboja	124	0.5113
9.	Timor Leste	134	0.4649
10.	Myanmar	146	0.4316
11.	Laos	167	0.3288

Sumber: UN E-Government Knowledgebase, Country Data, United Nations, 2020

Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilakukan evaluasi secara rutin dan berkala dengan memverifikasi dan memvalidasi informasi terhadap hasil dari penilaian mandiri guna mengukur sudah sejauh mana tingkat kematangan penerapan SPBE di setiap instansi pusat maupun pemerintahan daerah.

Terdapat nilai indeks SPBE yang berguna untuk mempresentasikan tingkat kematangan implementasi SPBE baik di instansi pusat maupun pemerintahan daerah secara keseluruhan. Adapun hasil dari nilai indeks dikelompokkan berdasarkan predikat pada Tabel I-2 sebagai berikut.

Tabel I-2 Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No.	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3.	3,5 – < 4,2	Baik
4.	1,8 – < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

Sumber: Predikat Penilaian SPBE, Kemenpan-RB, 2020

Menurut hasil evaluasi terakhir SPBE yaitu tahun 2019, Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai indeks SPBE 3,12 dengan baik sebagai predikat indeks nya, sehingga diperlukan pengoptimalan demi mendapatkan hasil lebih dari baik.

Dengan demikian, akhirnya pemerintah pun menyadari betapa pentingnya peran SPBE dalam mendukung seluruh sektor pembangunan. Upaya mendukung penerapan SPBE ini telah dilakukan oleh pemerintah dengan menyusun serta menerbitkan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengamanatkan pentingnya pelaksanaan SPBE. Seperti yang tertera pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel, transparan, serta memiliki pelayanan publik yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat dipercaya. Selain itu, tata kelola dan manajemen SPBE juga diperlukan secara nasional guna meningkatkan keterpaduan, efektivitas, dan efisiensi SPBE.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, disebutkan bahwa terdapat tujuh jenis layanan publik berbasis elektronik yang akan mendukung pelaksanaan pelayanan publik baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu layanan publik tersebut berfokus pada bidang sosial. Dinas Sosial merupakan salah satu Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat yang termasuk ke dalam bidang sosial, dan memiliki tugas pokok yang berfokus untuk merumuskan serta mengurus kebijakan operasional di bidang kesejahteraan atau urusan sosial.

Mengutip dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang menjadi acuan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan jangka menengah, terdapat visi pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu, "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi". Mengusung salah satu misinya yaitu, "Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif".

Dalam mewujudkan Misi ke-2 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Tujuan strategis yaitu "Meningkatnya Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat", dengan sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan dan Memperluas Kesempatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar". Pencapaian Tujuan dan Sasaran strategis tersebut

diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator Persentase Penduduk Miskin.

Misi tersebut juga diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat; agar rakyat Jawa Barat termasuk yang miskin dan rentan dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; penyandang disabilitas mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan lanjut usia dapat menikmati hidupnya dengan bahagia. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

Untuk mencapai tujuan misi tersebut, Dinas Sosial menetapkan sasaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, yang pada akhirnya mengukur efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara secara keseluruhan, dan memiliki tujuan utama yaitu menyediakan pelayanan publik yang memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut ini merupakan Tabel I-3 Penetapan IKU Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Tabel I-3 Penetapan IKU Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Aspek/Indikator Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2017	2018	2019	2019	2020	2020
Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang Terlayani Kesejahteraan Sosialnya	%	N/A	N/A	59,81	72,44	60,00	63,26
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan	%	N/A	N/A	40,00	50,82	50,00	56,45

Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PMKS							
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat, 2018

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yang telah ditetapkan, meskipun selalu memenuhi target, tetapi terdapat penurunan realisasi pada salah satu indikator yaitu, ‘Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang Terlayani Kesejahteraan Sosialnya’. Terdapat penurunan pencapaian sebesar 9,18%, dimana pada tahun 2020 terealisasi sebesar 63,26%, sedangkan pada tahun 2019 telah terealisasi mencapai 72,44%. Penurunan tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 sehingga penerimaan *client* di panti berkurang dan masih cukup banyaknya aktivitas pada proses bisnis Dinas Sosial yang dilakukan secara manual. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan realisasi pencapaian indikator meningkat setiap tahun sehingga dapat selalu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada seluruh penduduk Provinsi Jawa Barat dalam memberikan masyarakat kehidupan yang layak dan bermartabat.

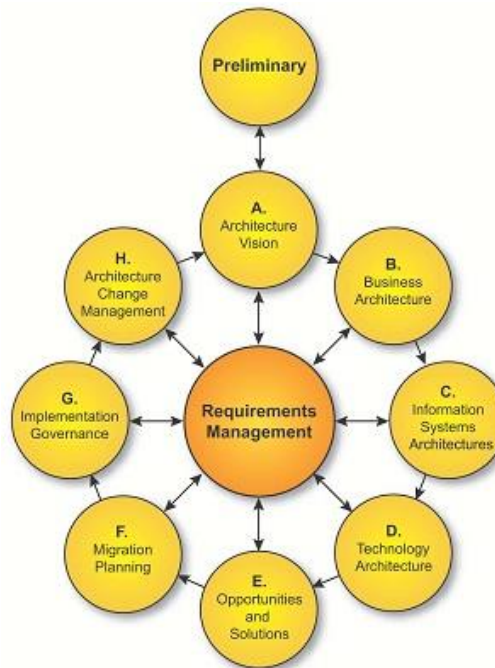
Dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terdapat 7 prinsip yang perlu terpenuhi secara maksimal tercantum pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu, efektivitas; keterpaduan; kesinambungan; efisiensi; akuntabilitas; interoperabilitas; dan keamanan. Untuk memaksimalkan terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut baik pada tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Dinas Sosial, dibutuhkan SPBE dengan berbasis konsep *Enterprise Architecture* (EA).

Berangkat dari visi misi Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengikuti visi Provinsi Jawa Barat, agar dapat tetap selaras dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan di wilayah Indonesia sehingga dapat mendukung pemenuhan target untuk penyelenggaraan pemerintahan negara secara keseluruhan, diperlukan infrastruktur yang kuat untuk menghadapi perubahan,

fleksibilitas, dan kesederhanaan sehingga dapat berkembang lebih signifikan guna memaksimalkan pencapaian baik visi misi Dinas Sosial maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Enterprise Architecture (EA) menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan konteks strategis untuk evolusi sistem TIK dalam merespon kebutuhan lingkungan bisnis yang terus berubah. EA bertujuan untuk memperbaiki manajemen dan fungsionalitas SI pada suatu organisasi. EA menyediakan cetak biru yang digunakan secara sistematis untuk mendefinisikan keadaan organisasi saat ini serta rancangan arsitektur TI yang diinginkan. Selain itu dengan menerapkan perancangan EA pada Dinas Sosial SPBE Provinsi Jawa Barat, diyakini dapat mendukung program pemerintah dalam membuat rencana induk SPBE yang termasuk di dalamnya proses bisnis, data & informasi elektronik, layanan, infrastruktur, aplikasi, serta keamanan sehingga dapat memenuhi 7 prinsip SPBE secara maksimal.

Kemudian, pemilihan kerangka kerja TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*) ADM (*Architecture Development Method*) dirasa paling cocok. TOGAF ADM merupakan kerangka kerja paling menonjol dan andal yang menjadi standar arsitektur perusahaan, karena TOGAF ADM memastikan standar, komunikasi, dan metode yang konsisten. TOGAF ADM mampu menyediakan tahapan detail yang memuat seluruh kebutuhan dari suatu perusahaan sehingga membantu untuk memanfaatkan sumber daya organisasi secara lebih efisien dan efektif. TOGAF ADM juga memiliki keterkaitan antar tiap fase dimana pengeluaran *output* yang berbeda-beda sangat diperhatikan, sehingga keluaran dari satu fase akan dapat memenuhi kebutuhan fase lain. Fase-fase TOGAF ADM digambarkan pada Gambar I-1 sebagai berikut.



Gambar I-1 Fase-Fase TOGAF ADM 9.2

Sumber: (The Open Group, n.d.)

Selain itu, standar TOGAF ADM versi 9.2 adalah pembaruan dari standar TOGAF ADM 9.1 yang memberikan panduan lebih baik dengan memperbaiki struktur dokumen, dan menghapus konten yang sudah usang. Peningkatan utama yang dibuat dalam versi ini mencakup pembaruan untuk arsitektur bisnis dan metamodel konten. Semua perubahan ini membuat kerangka kerja TOGAF ADM menjadi lebih mudah digunakan dan dipelihara. Sehingga, TOGAF ADM dirasa sangat ideal sebagai pilihan kerangka kerja dalam perancangan EA jika dibandingkan dengan kerangka kerja EA lainnya (The Open Group, n.d.).

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus dalam perancangan EA Urusan Sosial SPBE di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM 9.2.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini yaitu bagaimana implementasi Enterprise Architecture pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat memperbaiki

dan meningkatkan persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pada indikator PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang Terlayani Kesejahteraan Sosialnya?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah didefinisikan di atas, tujuan dari penelitian tugas akhir ini yaitu melakukan analisis dan perancangan untuk menghasilkan pemodelan eksisting dan targetting *Enterprise Architecture* (EA) mulai dari proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, serta teknologi guna memperbaiki dan meningkatkan persentase pelayanan publik Urusan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang berkualitas berdasarkan 7 prinsip yang tercantum pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak dan bermartabat kepada seluruh penduduk Provinsi Jawa Barat.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian dibatasi hanya untuk SPBE di Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- b. Ruang lingkup fokus penelitian yaitu pada Urusan Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- c. Pembahasan targetting yang dilakukan akan difokuskan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada indikator PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang Terlayani Kesejahteraan Sosialnya.
- d. Pembahasan targetting yang dilakukan akan difokuskan pada layanan publik kepada masyarakat.
- e. Perancangan *Enterprise Architecture* (EA) berfokus hanya menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM Versi 9.2 meliputi 4 fase yaitu, *Preliminary Phase*, *Phase A: Architecture Vision*, *Phase B: Business Architecture*, *Phase C: Information System Architecture*, dan *Phase D: Technology Architecture*.

I.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara umum, bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kedepannya dapat berguna memperbaiki layanan publik untuk masyarakat.
- b. Secara khusus, bagi Dinas Sosial, dapat memberikan sebuah usulan rancangan *Enterprise Architecture* (EA) sebagai target pedoman organisasi dalam upaya pengoptimalan layanan publik serta merancang sebuah blueprint sebagai acuan dalam penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Barat.
- c. Bagi peneliti lain, untuk memberikan sebuah referensi dalam melakukan penelitian serupa terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik khususnya pada Dinas Sosial.
- d. Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi bahan untuk belajar serta menambah wawasan baik dalam lingkup *Enterprise Architecture* (EA) maupun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar lebih baik di kemudian hari.